

**PEMILU 2014 DAN PENEGAKAN DEMOKRASI PROSEDURAL
(STUDY ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN CALON
LEGISLATIF PADA PEMILU 2014 DI KECAMATAN SOMBA
OPU KABUPATEN GOWA DALAM HAL
PENGGELEMBUNGAN SUARA)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan
Politik UIN Alauddin
Makassar*

Oleh

IKA ASMINASARI SITUJU

NIM : 30600111045

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT & POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Samata, 23 Maret 2016

Penyusun,

IKA ASMINASARI SITUJU

NIM. 30600111045

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi yang berjudul, “Pemilu 2014 dan Penegakan Demokrasi Prosedural (Study Analisis Terhadap Pelanggaran Calon Legislatif pada Pemilu 2014 di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Dalam Hal Penggelembungan Suara)” disusun oleh Ika Asminasari Situju, Nim: 30600111045, mahasiswa jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23, Maret 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

Gowa, 23 Maret 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abdullah Thalib, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, MA	(.....)
Munaqisy II	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, MA	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan
Politik UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP: 19590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pemilu 2014 dan Penegakan Demokrasi Prosedural (Study Analisis Pelanggaran Terhadap Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas jasa dan pengabdianya yang tulus dalam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada umat manusia.

Sebelumnya ucapan banyak terima kasih dan penghargaan penuh cinta, penulis persembahkan kepada Ayahanda MAPPATAJA SITUJU BA dan ibunda tercinta MARYAMA selaku Orang Tua Kandung, yang telah mengasuh, mendoakan, dan mendidik dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, baik lahiriyah maupun batiniyah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin dan wakil Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr.H.M. Natsir.M. Ag. selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr.Syarifuddin Jurdi, S.Sos.,M.Si, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Syahrir Karim,M.Si, ph.D. sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar.

4. Ibu Isma Tita Ruslin S.IP, M.Si. sebagai Pendamping Akademik yang telah memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof, Dr.H. Mohc. Qasyim Mathar,M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M,Si. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku Arief Situju, Firdaus Situju dan Kaka Ipar saya Aslinda Abdullah yang telah memberikan warna dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan rekan mahasiswa, khususnya para mahasiswa Jurusan Ilmu Politik di antaranya: Asmawarni, A. Reski Silvana amir, A. Indra Hardianti, Ahclak Asmara Yasa dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu.
10. Rekan-rekan mahasiswa KKN angkatan 50 UIN Alauddin Makassar, khususnya posko 4 Desa Kanjilo Kelurahan Barombong Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang telah memberikan dukungan secara moral kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi dukungan, Andi, Novi, Nisya, yang telah banyak menghibur serta semangat terhadap penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas

segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan setimpal. Amin

Samata, 23 Maret 2016

Penyusun

IKA ASMINASARI SITUJU

NIM. 30600111045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	15
1. Demokrasi	15
a. Demokrasi Substansial	17
b. Demokrasi Prosedural	19
2. Kekuasaan	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Lokasi Penelitian	23
4. Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Analisis Data	26
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GOWA	27
A. Profil Kabupaten Gowa	27
B. Gambaran Umum Pengawas Pemilu	29
1. Organisasi	29
2. Visi Panwaslu	31
3. Misi Panwaslu	31
4. Tujuan Panwaslu	32
5. Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu	34
6. Maksud dan Tujuan	39
C. Pemilu Legislatif Tahun 2014	39
1. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	43
2. Penetapan Jumlah Kursi dan Caleg Anggota DPRD Kab. Gowa	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Latar Belakang Pelanggaran Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	46
B. Penanganan Panwaslu dan Polisi Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	53
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

ABSTRAK

Nama : Ika Asminasari Situju

Nim : 30600111045

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : *Pemilu 2014 dan Penegakan Demokrasi Prosedural (Study Analisis Terhadap Pelanggaran Calon Legeslatif pada Pemilu 2014 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam Hal Penggelembungan Suara)*

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pelanggaran terhadap calon legeslatif pada Pemilu 2014 di Kecamatan Somba Opu dalam hal penggelembungan suara. adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para calon legeslatif dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam menangani kasus penggelembungan suara.

Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi sehingga memunculkan adanya kegiatan pelanggaran seperti penggelembungan suara dalam Pemilu 2014 yang lalu adalah karena banyak diantara para calon memiliki keterkaitan kekerabatan yang dalam antara para calon dengan pemegang kekuasaan di Pemerintahan sehingga penyalahgunaan kekuasaan sangat gampang dilakukan. Selain dari itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga untuk hal-hal sangat urgen pun disepelekan begitu saja. Sedangkan untuk pelanggaran pidana akan selanjutnya diteruskan oleh pihak Kepolisian. Setelah pihak Kepolisian sudah mengantongi berkas yang sudah dinyatakan P21 (lengkap) pihak Kepolisian mengirim barang bukti (yang disebut dengan Tahap 2), pengiriman tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. Setelah tahap ke dua maka Kepolisian dinyatakan telah selesai dalam penyidikan. Giliran pihak Kejaksaan yang mengirim berkas tersebut ke pengadilan untuk selanjutnya disidangkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi yang dilaksanakan oleh Indonesia bertujuan menyampaikan aspirasi rakyat yang terkungkung oleh dimensi kekuasaan selama bertahun-tahun sehingga hal ini menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan kegiatan masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, dalam demokratisasi sebuah Negara dan Daerah dikenal berbagai istilah mengenai demokrasi. Sebagaimana kutipan berikut ini yang menjelaskan demokrasi dan pembagiannya.

Dalam mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat yang berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa). Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarata perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.¹

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi. 2010. Hlm 105-108

Demokrasi masih ada pada tataran prosedural, dimana pesta demokrasi yang dilakukan baik dalam pilkada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden telah berlangsung secara demokratis, akan tetapi substansi demokrasi untuk kesejahteraan belum nyata. Demokrasi hanya sebatas prosedural dan hanya menampilkan simbol-simbol demokrasi, ini bisa disaksikan pada setiap pemilu yang lebih menonjol seremoni peristiwa demokrasi dan belum menyentuh makna mendasar yaitu distribusi pendapatan secara tepat dan adil. Demokrasi yang berjalan masih “dimainkan” oleh pihak yang sangat berpengaruh dalam kekuasaan, sehingga sangat tidak mungkin bergulir kebijakan rakyat, karena parlemen dan lembaga politik hanya dikuasai oleh lingkaran penguasa.²

Demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan sebagian lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya. Pada berbagai kesempatan mulai di obrolan warung kopi, sampai dalam forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi publik dan sebagainya. Semaraknya perbincangan tentang “demokrasi” semakin memberikan dorongan kuat agar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Wacana tentang “demokrasi” seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan, sehingga tema pembicaraan antara lain “Islam dan demokrasi”, “politik

²Rogaiyah Alfitri, *Jurnal PPKn dan Hukum*. Palembang : Universitas Sriwijaya. Vol.4. 2009. Hlm 3

dan demokrasi”, “ekonomi dan demokrasi, “pendidikan dan demokrasi”, “hukum dan demokrasi”, dan tema lainnya. Karena itu demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.³

Demokrasi sering diartikan sebagai kebebasan bertindak dan berbicara. Demokrasi sering juga diartikan sebagai persamaan hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam praktiknya demokrasi sering disalahtafsirkan sehingga banyak orang yang berbicara dan bertindak secara bebas dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang berlaku. Mereka bekerja dan bertindak bebas dengan berlindung dibelakang kata demokrasi atau hak asasi manusia.

Pemilihan umum untuk selanjutnya disebut pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini juga dicantumkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “pemilihan umum untuk selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Makna dari kedaulatan rakyat tersebut adalah: *pertama* rakyat memiliki

³A. Ubaidillah Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Press. 2006. Hlm 161

kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. *Kedua* rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.⁴

Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) Undang-undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.⁵

Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut KPU adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 22E, Angka 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836. Hlm2-4

⁵Penjelasan Umum atas Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. 2008. Hal 7

Penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat konstitusi. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini diharapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu terlepas dari pengaruh serta kepentingan dari pihak manapun.

Adapun yang menjadi peserta pada pemilu legislatif tahun 2014 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah partai politik. Sedangkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Ketentuan

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

tentang peserta pemilu ini diatur pada Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008.

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun yang menjadi pengawas pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Paswaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan

untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu.⁷

Pelanggaran dapat diartikan sebagai sengketa atau penyalahan aturan yang berakibat kepada sebuah sangsi yang terjadi pada saat pemilu berlangsung. Ramlan Subakti Dkk (2011) Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya,

Meskipun tidak disebut secara tegas dalam UU No. 10/2008, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit, baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaanya, yaitu masalah hukum lainnya. Penting diingat bahwa tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu.

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 Hlm5

Kenapa hal ini perlu dibatasi? Karena jika diartikan terlampau luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye. Hal ini bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundang-undangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi, tentu hal ini menyangkut undang-undang korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.⁸ Allah SWT berfirman dalam surah Al-maidah (5) : 8 yang berbunyi :

دَلُّوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَأَنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ ۖ كُونُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-maidah (5) : 8)⁹

Dengan adanya pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dari dalam dan dari luar lembaga penyelenggara diharapkan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis dan memenuhi asas pemilu. Pada tahapan pelaksanaan pemilu, Panwaslu

⁸Ramlan Surbakti Dkk, *Penanganan pelanggaran pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2011. Hlm 9

⁹Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al - Maidah Ayat 8*. Semarang : Toha Putra. 2005

baik di pusat maupun di daerah berhak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan juga terhadap penyelenggara pemilu. Apabila dalam tahapan pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka panwaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Jika dari data dan fakta yang ditemukan panwaslu menganggap telah terjadi pelanggaran administrasi maka persoalan tersebut dapat dilimpahkan kepada KPU.

Adapun nama dan nomor urut partai politik nasional pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah :Partai Politik sebagai peserta pemilu menunjuk anggota ataupun kader partai untuk menjadi calon legislatif. Untuk dapat memperoleh kursi legislatif partai politik diantaranya : 1. Nasional Demokrat (NASDEM) 2. Partai Kesatuan Bangsa (PKB) 3. Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 7. Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT) 8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 11. Partai Bulan Bintang (PBB) 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Oleh karena itu calon legislatif harus bisa mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Untuk mendapatkan perolehan suara yang maksimal dari pemilih, partai politik dan calon legislatif akan melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan kampanye atau sosialisasi kepada pemilih. Akan tetapi pemilu tercederai karena calon yang ikut dalam kegiatan pemilu tidak menunjukkan kegigihan yang tangkas dalam memenangkan pemilihan umum. Diantaranya adalah banyaknya calon

yang melakukan *money* politik dan proses penggelembungan suara dengan imbalan yang sangat besar dari kerjasama antara calon legeslatif dan para pengawas pemilu dan para saksi yang ditunjuk secara langsung. Masalah ini cukup berlanjut karena mampu menjadi temuan dan merupakan masalah besar dalam proses penggalangan demokrasi yang jauh dari pelanggaran demokrasi itu sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pelaksana kampanye pada pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, kampanye pemilu dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat umum;
- f. rapat umum, dan;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul ***“Pemilu 2014 Dan Penegakan Demokrasi Prosedural” (Study***

Analisis Terhadap Pelanggaran Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 Di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Dalam Hal Penggelembungan Suara)

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pelanggaran dalam pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa dalam hal penggelembungan suara?
2. Bagaimana proses penanganan Panwaslu dan Kepolisian terhadap pelanggaran pemilu legislatif 2014 dalam hal penggelembungan suara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa dalam hal penggelembungan suara
2. Untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan Panwaslu kabupaten Gowa terhadap pelanggaran pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa dalam hal penggelembungan suara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ditujukan bukan hanya untuk penulis sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas serta ditujukan juga bagi para penegak hukum dalam praktik penegakan hukum yang berlaku. Oleh karena itu manfaat penelitian ini penulis kelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademis dalam pengembangan pengetahuan ilmu politik. Selain itu manfaat yang diharapkan yaitu untuk mengetahui peranan panitia pengawas pemilu dan seberapa penting panitia pengawas pemilu dalam mengawasi jalannya pemilu terutama pada pemilu calon legislatif.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga agar penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih objektif dan selektif dalam memilih calon legislatif. Selain itu manfaat yang dapat diperoleh akan mengarah kepada lembaga Panwaslu sendiri untuk lebih melaksanakan kewenangannya dalam menangani pelanggaran yang terjadi didalam pemilukada sehingga proses pemilukada dapat terlaksana seperti yang diharapkan oleh prinsip demokratis.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pelanggaran pemilu bukanlah hal yang baru telah ada banyak penelitian yang serupa yang mengkaji tentang pelanggaran pemilu yang dimulai sejak pemilihan umum 2004, 2009 dan 2014.

Sebagaimana penelitian dalam skripsinya yang dilakukan oleh SriWulan Dayasari yang berjudul *Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006* dalam penelitian ini Sriwulan mengungkapkan, secara ringkas hasil penelitian yang didapat antara lain, adanya

politik uang yang dilakukan oleh salah satu tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pelanggaran tersebut dilakukan saat masa tenang sebelum pemilihan. Belum juga pelanggaran tersebut terselesaikan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terbelit kasus politik uang ini terpilih dan akhirnya dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut adalah rendahnya pendidikan politik yang dimiliki masyarakat sekitar dan lemahnya ekonomi masyarakat sekitar. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran panwaslu telah melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga serta mengawasi jalannya pilkada agar hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada sisi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran pemilu. Sedangkan penelitian ini hanya ingin mengetahui pelanggaran apa yang dilakukan oleh para calon legeslatif.¹⁰

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Musawir dalam skripsinya yang berjudul *Pelanggaran Pemilu Pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2008* dalam penelitian ini Musawir mengungkapkan berdasarkan metode penelitiannya, temuan penting, hasil analisis dan kesimpulannya yaitu, adanya beberapa pelanggaran seperti politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye pesaing lain, penggunaan alat negara dalam pelaksanaan kampanye, black campaign, serta pengikutsertaan warga negara

¹⁰Sriwulan Dayasari. *Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006*. Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar . 2010. Hlm 4

yang belum memiliki hak pilih dalam pilkada. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki panwaslu sehingga sulit mengontrol jalannya proses pilkada, pendidikan politik yang dimiliki masyarakat sekitar, dan faktor ekonomi masyarakat sekitar. Untuk meminimalisir pelanggaran Panwaslu telah melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga serta mengawasi jalannya pilkada Sinjai agar hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Perbedaannya terletak pada skop pemilihan yang dilakukan karena penelitian sebelumnya menggunakan skop kabupaten sedangkan penelitian sekarang menggunakan skop kecamatan.¹¹

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Sherly Saputri dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Pemilihan Umum Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas 2010*. Dalam penelitian ini, Saputri juga mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum kepala daerah di Sumatera Barat tahun 2010 lalu, digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan sengketa pemilihan umum kepala daerah. Proses penanganan pelanggaran, Panwaslu provinsi akan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian akan dicatat di dalam berita acara untuk dibacakan sekaligus dalam pemanggilan saksi. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan terhadap saksi pelanggaran maka Panwaslu provinsi akan mengadakan rapat pleno

¹¹Musawir. *Pelanggaran Pemilu Pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2008*. Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu social dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 2009. Hal 7

untuk menentukan jenis pelanggaran. Kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Provinsi dalam penanganan pelanggaran pemilu pada di Sumatera Barat 2010 lalu yaitu laporan pelanggaran dari masyarakat tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, ketidakmauan peserta pemilu untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, keterbatasan personil Panwaslu yang tidak bisa *mencover* setiap pelanggaran, walaupun ada laporan pelanggaran yang diterima oleh panwaslu, tidak semua laporan memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Panwaslu Provinsi, dan kewenangan Panwaslu yang masih terbatas yang diberikan oleh undang-undang. Perbedaannya terletak pada peserta dan pengawas pemilu sedangkan penelitian sekarang hanya ingin melihat pelanggaran apa yang dilakukan oleh para calon legeslatif di pemilu 2014.¹²

F. Kerangka Teori

1. Demokrasi

Demokrasi secara etimologis “demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Sementara itu secara terminologis demokrasi.¹³

¹² Sherly Saputri, *Yang Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2010. Hlm 2

¹³ Ignes Kleden, *Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan*. Jakarta : Freedom Institute. Hlm161. 2006

Menurut Josef A. Schumeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memustuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Demokrasi dapat difahami sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Phillipe C. Schmitter dan Terry Linn Karl, demokrasi merupakan suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja samadengan para wakil mereka yang telah terpilih.¹⁴

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Untuk itu demokrasi mampu dikenali dengan berbagai pengertian hal ini disebabkan karena demokrasi sebenarnya merupakan wujud dari pada tingkah laku manusia yang sesungguhnya.¹⁵

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan

¹⁴ Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Ham, dan Mayarakat Madani Agar Umat Tidak Jadi Buih. IAIN Jakarta Press, 2000. Hlm.162

¹⁵Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1995. Hlm 207

berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.¹⁶

a. Demokrasi Substansial

Demokrasi substansial (nilai hakiki), di mana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada sesuatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya, misalnya adanya kebebasan (freedom), budaya menghormati kebebasan.¹⁷

Menurut Huntington demokrasi substansial adalah nilai-nilai yang terkandung dalam esensi demokrasi seperti kebebasan, keadilan, persamaan hak dan sebagainya. Demokrasi substansial merupakan suatu pelaksanaan pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, kebersamaan, serta kebebasan memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum, baik pemilihan Presiden dan Pilkada. Model demokrasi substansial adalah salah satu sistem antitesa dari demokrasi prosedural yang sangat normatif, walaupun pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sampai pada tahap demokrasi

¹⁶ Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Agar Umat Tidak Jadi Buih. IAIN Jakarta Press, 2000. Hlm.162

¹⁷ Achmad Riyanto *Konsep demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar*. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum 2010. Hlm.19

substansial, namun masyarakat Indonesia tidak pesimis untuk menuju pada tahap demokrasi substansial.¹⁸

Muncul berbagai wacana mengenai format demokrasi di Indonesia yang diinginkan terwujud di masa mendatang. Melalui sebuah konsolidasi demokrasi, yakni melalui proses transformasi politik secara bertahap dan terukur pada berbagai aspek kehidupan politik, maka demokrasi konstitusional diharapkan dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari segi konstitusional, sistem demokratis (*democratic regime*) dalam sebuah negara disebut terkonsolidasi (*fully consolidated*) jika kekuatan pemerintah (negara) dan non-pemerintah (masyarakat) sama-sama tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan melalui proses yang demokratis. Dari segi sikap, sistem demokratis dalam sebuah negara disebut terkonsolidasi jika dalam keadaan krisis politik yang mendalam sekalipun, mayoritas opini publik tetap memegang keyakinan bahwa prosedur dan institusi demokrasi adalah satu-satunya cara menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kolektif, dengan demikian menutup kemungkinan masuknya kekuatan-kekuatan anti-demokrasi¹⁹

¹⁸Achmad Riyanto *Konsep demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Akbar Tandjung dan A.Muhaimin Iskandar* (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum 2010) Hlm.20

¹⁹Nugroho, Rian. *Public policy*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo2012) Hlm.16

b. Demokrasi Prosedural

Demokrasi prosedural (aturan atau tata cara), di mana demokrasi hanya bisa tegak jika ada prosedur-prosedur formal yang memungkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan. Pemilihan umum yang bebas, adanya DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independent adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi.²⁰ Menurut Huntington demokrasi prosedural adalah demokrasi sebagai tata cara memerintah.²¹

Demokrasi yang semakin mendalam di Indonesia berhenti di titik *politik*, yaitu kehidupan multipartai yang begitu *riuh rendah*, pemekaran wilayah yang membuat rendah APBN lebih banyak “*berlubang*” untuk urusan membiayai para “elite politik” daerah-daerah baru, bupati baru, wali kota baru, jajaran pemda yang baru, DPRD baru, dan seterusnya, dari pada untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dan yang paling *hiruk-pikuk* adalah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Langsung). Dengan Pilkada Langsung, dan dengan 33 provinsi dan 450 Kabupaten/Kota (per April 2007), maka ada 483 Pilkada di Indonesia. Seorang yang mencalonkan diri menjadi bupati atau wali kota membelanjakan dana antara Rp.7,5 hingga 25 miliar. Untuk gubernur, per calon, diperkirakan membelanjakan dana sekitar Rp.25 miliar.

²⁰ Achmad Riyanto *Konsep demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Akbar Tandjung dan A.Muhaimin Iskandar*. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2010. Hlm.19

²¹ Achmad Riyanto *Konsep demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Akbar Tandjung dan A.Muhaimin Iskandar*. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2010. Hlm.20

Demokrasi menjadi begitu mahal namun, hasilnya masih belum pasti. Memang, ada sejumlah daerah yang dengan demokrasi di daerah menjadi lebih maju.²²

Akan tetapi, kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat, dan banyaknya masyarakat yang termarginalkan menjadi bukti bahwa penerapan demokrasi prosedural saat ini belum efektif, terhubung demokrasi yang berjalan saat ini masih berada di tangan para penguasa atau para elit politik yang mempunyai kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

2. Teori Kekuasaan

Konsep kekuasaan dalam ilmu politik sebenarnya merupakan inti dari berbagai permasalahan politik di dunia. Oleh karena itu, peran kekuasaan menjadi salah satu barometer yang perlu di ketahui keberadaannya sebagai bentuk paradigm dalam kehidupan. Seperti perkataan salah satu ahli dibidang kekuasaan yang mendefenisikan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah maupun secara tidal langsung dengan mempergunakan segala cara dan segala alat dengan menggunakan cara yang tersedia.²³

Untuk menekankan kekuasaan itu sendiri, maka dapat pula didefenisikan sebagai penggunaan sebagian besar sumber daya yaitu asset dan kemampuan tidak lain hanyalah untuk memperoleh kepatuhan baik itu secara tingkah laku ataupun apa saja yang perlu disesuaikan dengan kebiasaan orang lain. Sehingga dalam

²² Nugroho, Rian. Public policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2012. Hlm17-18

²³Robert M. Maciver. *The Web of Government*. New York : The Macmillians Company. 1961 Hlm. 22. Dalam Muslim Mufti, Bandung : Pustaka Cetak. 2012. Hlm. 53

mengartikan kekuasaan secara verbal adalah kekuasaan pada hakekatnya sebagai suatu kemampuan seseorang atau secara berkelompok untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang yang memiliki sebuah kekuasaan.²⁴

Dalam kekuasaan sebenarnya perlu dibedakan antara kekuasaan itu sendiri dan kewenangan, hal ini disebabkan karena suatu kewenangan sudah jelas adalah kekuasaan akan tetapi sebuah kekuasaan belum tentu selalu menjadi kewenangan. Jelasnya adalah kewenangan merupakan sebuah kekuasaan yang memiliki suatu keabsahan sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki sebuah keabsahan. Kekuasaan setidaknya merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Untuk itu, perjalanan kekuasaan yang lebih efektif bergantung pada tipe-tipe sumber kekuasaan yang tersedia. Dengan kata lain bahwa untuk memperoleh kepatuhan, para pemimpin politik memperluas persediaan sumber daya mereka dan secara lebih efisien menggunakan sumber daya telah mereka miliki. Akan tetapi adapula yang menghubungkan bahwa kekuasaan dapat dihubungkan dengan suatu masyarakat. Maka kekuasaan dan masyarakat didasarkan pada posisi yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat.

²⁴ Andrain. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana. 1992. Hlm.130

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran dan menguraikan tentang pelaksanaan proses analisis pelanggaran kampanye dan upaya penyelesaian oleh PANWASLU, dan KPU pada pemilu calon legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa, kemudian bagaimana menganalisis penegakan demokrasi prosedural di Indonesia kedepannya.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.

Metode penelitian deskriptif ini adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.²⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, penulisan ini berupaya untuk menggambarkan atau

²⁵Sekar Paramita, *Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Araska Publisher 2014. Hlm38.

mendesripsikan fakta-fakta yang ada terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD tetapi dikhususkan pelaksanaannya di wilayah kabupaten Gowa dengan menitik beratkan pada pelanggaran kampanye dari ketentuan yang berlaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Gowa, dan Panwaslu kabupaten Gowa,, serta hambatan yang muncul dan dihadapi dalam upaya penegakan hukum tersebut.

3. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi penelitian di kantor Bawaslu Provinsi, dan Polres Kabupaten Gowa yang berwenang mengidentifikasi serta menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu calon Legislatif 2014 di Kabupaten Gowa.

4. Data

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara langsung dengan informan seperti staf BAWASLU Kota Makassar, Panwaslu Kabupaten, pihak Kepolisian (Polres) Kabupaten Gowa.

- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari dokumen baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang berupa sejumlah pendapat, teori yang di dapat dari mempelajari buku-buku, laporan-laporan, arsip pelanggaran kampanye di PANWASLU, literatur, peraturan perundang-undangan (UU No 10 Th 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 2 Th 2008 tentang partai politik) dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian;

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen perusahaan maupun literature-literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. *Field Research*, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengamatan ini dilakukan dengan cara

observasi partisipan, dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis, dan sebagainya.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang di asumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).

Dalam penelitian akan menggunakan pendekatan dan analisis ini untuk dipergunakan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan nara sumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :²⁶

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pihak dari Bawaslu yaitu Kepala Sub Bagian Pengawasan: | 1 orang |
| 2. Pihak dari Kepolisian | : 1 orang |
| 3. Pihak dari ketua Panwascam | 1 orang |
| 4. Masyarakat | : 6 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah Sumber terkait | : 9 orang |

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini akan di bahas sebagai berikut.

²⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta. 2006)

6. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan melalui hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷

Dengan demikian data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisa sehingga dapat difahami dan dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung oleh hasil wawancara.

²⁷Miles, dan Huberman. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press : Jakarta. 1992. Hlm 103

BAB II

PROFIL KABUPATEN GOWA

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Berdasarkan data dari biro Pusat Statistik Kabupaten Gowa, luas wilayah Kabupaten Gowa Berkisar 1.883,33 km². Berada pada posisi 12° 18,16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5° 33,6' Bujur Timur dari Kutub Utara, dengan ketinggian mencapai 100 meter dari permukaan laut. Adapun letak geografis wilayah Kabupaten Gowa berada pada posisi :¹

- Sebelah Utara Kotamadya Makassar dan Kabupaten Maros.
- Sebelah Timur Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Sebelah Selatan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Sebelah Barat Kota madya Makassar dan Kabupaten Takalar.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40° yaitu Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bungaya, Tompobulu dan Tinggimoncong. 35,06 kemiringan tanahnya berkisar antara 15° – 40° dan 15,62% wilayah Kabupaten Gowa berada pada kemiringan 2° – 15°.²

Pada umumnya Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22° – 26° C untuk dataran rendah, sedangkan daerah dataran tinggi berkisar 8° – 21° C. Dan terdapat pula 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim

¹Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2014*. Gowa-Sungguminasa. 2016

²Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2014*. Gowa-Sungguminasa. 2016

hujan, biasanya musim kemarau dimulai pada bulan juni hingga september, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan desember hingga maret. Ada sejumlah 15 sungai di Kabupaten ini, dengan total panjang 430 km dan luas daerah perairan sekitar 62,45% dari luas Kabupaten Gowa.³

Untuk kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa dapat dilihat tabel di bawah ini lebih jelasnya

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan Terhadap Kota Gowa Sungguminasa -

No	Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota Kabupaten (Km)	Luas Kecamatan (Km2)	Thd Luas Kabupaten
1	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupten Gowa, 2016

³Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2014*. Gowa-Sungguminasa. 2016

B. Gambaran Umum Pengawas Pemilu

1. Organisasi

a. Struktur Organisasi

1) Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Gowa

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 memiliki struktur kelembagaan sebagai berikut:

a) Rapat Pleno

b) Pimpinan : Alfian Ali Nompo, S.Pd. (Ketua)

Nisma Iriani SE., M.Si. (Anggota)

Ratnawati, SH. (Anggota)

c) Divisi : Nisma Iriani, SE., M.Si.

(Pengawasan dan Humas)

Alfian Ali Nompo, S.Pd. (Umum)

Ratnawati, SH.

(Tindak Lanjut dan Penanganan Pelanggaran)

d) Kesekretariatan

Kepala Sekretariat : Drs. Amril Amiruddin, M.Si.

Bendahara : H. Nurdin

Staf Sekretariat : Abd. Rahman

Harlina, SE.

Rusli, SE.

Muh. Jufri, S.Si.

Agussalim, R.

Saipul, ST.

Abd. Salam Nur

Muh. Syarif Alqadri

Muh. Azhar Nur

Dwi Endang Sayekti

Aliyah Lathifah

2) Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan dan PPL

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 wilayah kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan sehingga juga dibentuk 18 Panwaslu Kecamatan dan 501 PPL Desa/Kelurahan dengan alokasi 3 orang untuk setiap kecamatan dan 3 orang untuk setiap Desa/Kelurahan. Struktur Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

3) Panwaslu Kecamatan Somba Opu

Ketua : Muhajirin

Anggota : Yusran

Anggota : Sopyan, SP.

Kepala Sekretariat : Daniyal Opo, SS., M.Si.

Bendahara PUMK : Fitriani, S.Sos.

Staf Sekretariat : Fitri Dewi, S.Pd.

Staf Sekretariat : Saparuddin, M., SE.

Staf Sekretariat : Manjuluri Hamzah

PPL : 42 orang tersebar pada 14 Kelurahan

Badan pengawas Pemiliha Umum dan jajarannya kebawah sebagai lembaga yang mendapatkan amanat dari konstitusi sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum, berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum telah menetapkan visi, misi, dan tujuan.

2. Visi Panwaslu adalah :

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pernyataan visi tersebut telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum dan pelaksanaan demokrasi.

3. Misi Panwaslu adalah :

- a. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
- b. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
- c. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu.
- d. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.

- e. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

4. Tujuan Panwaslu adalah

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilihan umum.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum.
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen.
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis.
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlakunya undang-undang tersebut menandai berakhirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Perubahan tersebut merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan Kecamatan.

5. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas pemilu (PANWASLU)

Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan itu mengandung unsure tindak pidana yang dilakukan secara benar, adil, dan konsisten sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Memantau apakah benar diberlakukannya hukum pada saat terdapat pidana pemilu atau tidak. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan adanya disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

1) Panitia pengawas pemilu kabupaten

a) Tugas

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota yang meliputi:
 - Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan pencalonan bupati/wakli kota
 - Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan calon bupati/walikota
 - Penetapan calon bupati/walikota
 - Pelaksanaan kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara;
 - Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota ;

Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

b) Wewenang

- Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2) Panitia pengawas pemilu kecamatan

a) Tugas

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
 - Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan pencalonan bupati/walikota;

- Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan calon bupati/walikota;
 - Penetapan calon bupati/walikota;
 - Pelaksanaan kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kecamatan;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan pemilihan bupati/walikota;
- Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

- Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;
- Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kecamatan, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kecamatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Wewenang

- Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

6. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) juga wajib untuk menyusun laporan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kendala di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

C. Pemilu Legislatif Tahun 2014

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sesungguhnya merupakan tradisi politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam system pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip

bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik adalah pemilihan umum, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu.

Setelah berakhirnya secara formal kekuasaan orde baru, Indonesia memasuki periode peralihan dari situasi otoriter ke transisi demokrasi. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa periode transisi demokrasi umumnya memakan waktu lama, sampai satu atau dua decade tergantung dari intensitas transisi yang berakibat pada perubahan mendasar dalam sistem politik dan juga system ekonomi. Tak terkecuali bagi Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Gowa pada khususnya. Perubahan itu diawali dengan penyelenggaraan pemilu mekanisme demokratis untuk melakukan sirkulasi elit. Pejabat publik, dipilih melalui Pemilu yang demokratis. Pemilu yang dilaksanakan pada masa transisi juga menjadi sarana bagi pemikiran dan gagasan baru yang segar dan tidak koruptif kedalam lingkaran kekuasaan. Jika pemilu masa transisi berhasil melembagakan proses sirkulasi elit secara demokratis, maka situasi transisi akan berubah menuju konsolidasi demokrasi. Untuk dapat menjadi sebuah pilar demokrasi, pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, pemilu harus mampu menjadi sebuah saluran sirkulasi kekuasaan secara damai yang kompetitif. Beberapa kata kunci dalam kalimat ini adalah *sirkulasi kekuasaan*, *damai*, dan *kompetitif*. Sirkulasi kekuasaan mengindikasikan terbukanya kesempatan untuk melakukan pergantian

pejabat secara periodik, memberhentikan pejabat-pejabat yang dianggap tidak kapabel dan menggantikannya dengan kandidat-kandidat yang dipandang lebih mampu menggunakan periodisasi tertentu yang berjalan secara regular.

Pemilu damai menunjukkan terciptanya sebuah mekanisme yang memiliki aturan main tertentu yang ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga menjadi saluran perebutan kekuasaan maupun penyelesaian konflik yakni kekerasan dan dijalankan dengan cara-cara damai dengan sistemik. Kompetitif mensyaratkan pelaksanaan pemilu baik kandidat maupun rakyat pemilih mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembuatan kekuasaan. Prinsip ini menegaskan hak-hak istimewa yang dapat memarginalkan kesempatan pihak lain mengikuti kompetisi perebutan jabatan secara *fair*, tidak dibenarkan. Sistem kompetitif mensyaratkan setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di depan hukum. Secara konseptual, prinsip-prinsip ini diimplementasikan dan seluruh proses Pemilu (electoral process) sehingga didapatkan proses pemilu yang berkualitas dan efisien yang menjadi batu pijakan terwujudnya pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, mengingat arti penting Pemilu pada masa transisi, maka semua penggerak demokrasi serta warga yang peduli akan tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia dan di Kabupaten Gowa khususnya sebagai pemilu yang demokratis.

1. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu

anggota DPD. Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilu. Adapun partai politik peserta pemilu 2014 di Kabupaten Gowa beserta nomor urutnya adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1: Partai Nasiona Demokrat (NASDEM)
- b. Nomor Urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- c. Nomor Urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- d. Nomor Urut 4: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- e. Nomor Urut 5: Partai Golongan Karya (GOLKAR)
- f. Nomor Urut 6 : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA)
- g. Nomor Urut 7 : Partai Demokrat (PD)
- h. Nomor Urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN)
- i. Nomor Urut 9 : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- j. Nomor Urut 10 : Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

k. Nomor Urut 11 :Partai Bulan Bintang (PBB)

l. Nomor Urut 12 : Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI)

2. Penetapan Jumlah Kursi dan Caleg Anggota DPRD Kabupten Gowa

Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Sedangkan jumlah alokasi kursi setiap Kabupaten/Kota telah diatur pada Undang-undang Negara Republik Indonersia nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Tabel 1. Penetapan Jumlah Kursi dan Caleg Anggota DPRD
Kabupaten Gowa**

JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA KABUPATEN GOWA DALAM PEMILU TAHUN 2014

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	DP GOWA 1 Meliputi Kecamatan: 1.1 SOMBA OPU	140.584	9
2	DP GOWA 2 Meliputi Kecamatan: 2.1 BONTOMARANNU 2.2 MANUJU 2.3 PARANGLOE	33.978 14.043 16.277 22.513	6

	2.4 PATTALASSANG		
3	DP GOWA 3 Meliputi Kecamatan: 3.1 TINGGI MONCONG 3.2 PARIGI 3.3 TOMOBOLO PAO	21.230 14.282 26.859	4
4	DP GOWA 4 Meliputi Kecamatan: 4.1 BUNGAYA 4.2 TOMPOBULU 4.3 BIRINGBULU 4.4 BONTOLEMPANGAN	17.148 25.433 31.159 15.966	6
5	DP GOWA 5 Meliputi Kecamatan: 5.1 BONTONOMPO 5.2 BONTONOMPO SELATAN	39.751 29.931	4
6	DP GOWA 6 Meliputi Kecamatan: 6.1 BAJENG 6.2 BAJENG BARAT	62.916 23.518	6
7	DP GOWA 1 Meliputi Kecamatan: 7.1 PALLANGGA 7.2 BAROMBONG	109.387 37.050	10
JUMLAH		682.025	45

Sumber : Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan

NO	NAMA PARPOL															JML
		Dp1		Dp2		Dp3		Dp4		Dp5		Dp6		Dp7		
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	Pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	
1	Nasdem	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	7	3	45
2	Pkb	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	7	3	45
3	Pks	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	7	3	45
4	PDI-P	6	3	4	2	2	2	3	2	2	2	4	2	6	4	44
5	Golkar	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	3	3	7	3	45
6	Gerindra	5	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	6	4	44
7	Demokrat	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	7	3	45
8	Pan	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	6	4	45
9	PPP	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	7	3	45
10	Hanura	6	3	4	2	2	2	4	2	2	2	4	2	7	3	45
11	PBB	4	3	3	2	2	2	4	2	2	2	3	2	5	3	39
12	PKPI	6	3	2	1	2	2	4	2	2	2	3	2	6	3	40
JUMLAH		69	36	45	23	24	24	47	24	24	24	45	25	78	39	527

Tabel 3 Jumlah Calon Tetap Anggota Legislatif Kabupaten Gowa

Sumber : Bawaslu Provinsi Sulawesi - selatan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pelanggaran Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Terjadinya pelanggaran pemilu dapat di katakan sangat berdampak negatif di berbagai bidang terutama di bidang politik, ekonomi dan hukum baik di suatu daerah ataupun di bangsa dan negara Indonesia ini sendiri. Salah satu faktor pendorong untuk melakukan pelanggaran pemilu adalah adanya keterkaitan kekerabatan yang dalam antara para calon dengan pemegang kekuasaan di Pemerintahan. Selain dari itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga untuk hal-hal sangat urgen pun disepelekan begitu saja. Ditambah lagi masyarakat yang terlalu gampang dipengaruhi dengan berbagai iming-iming dan imbalan dari para calon sehingga kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai demokratisasi sangat kecil bahkan ditiadakan begitu saja.

Untuk itu dalam pemaparan hasil penelitian berikut ini ada beberapa pelanggaran yang di lakukan oleh para pelaku pemilu di Kabupaten Gowa pada Tahun 2014 yang lalu. Pelanggaran tersebut dilakukan cukup beragam bentuknya, ada pelanggaran dilakukan pada saat sebelum pemilihan ada pula pelanggaran yang di lakukan ketika berjalannya proses pemilihan. Yang lebih fatal adalah adanya pelanggaran yang dilakukan ketika rekapitulasi hasil pemilihan di lakukan.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku Pemilu 2014 yang lalu dalam hal ini calon legeslatif, dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang sangat nyata karena sangat menyangkut dengan keberadaan masyarakat luas. Bentuk pelanggaran tersebut dilakukan secara meluas ke seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Gowa. Pelanggaran yang pertama yaitu adanya calon legeslatif yang menyalahgunakan uang Negara untuk kepentingan pribadinya. Bentuk pelanggaran ini memang tidak muncul bersamaan dengan pelaksanaan pemilu akan tetapi perlu ditelusuri dengan baik.

Selanjutnya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pemilu terhadap wajib pajak. Hal ini sangat menuai pertanyaan, sebab para calon dewan yang ikut dalam pemilu 2014 menganggap ketika terlibat dalam pesta pemilu sejak itu pula tanggung jawab terhadap wajib pajak sudah tidak berlaku. Padahal sebelum dan sesudah pemilu, terpilih sebagai wakil rakyat atau tidak tanggung jawab terhadap wajib pajak tetap berjalan. Hal ini dilakukan karena pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh penduduk yang tinggal dalam satu wilayah di tanah air.

Adanya bentuk pelanggaran diatas, ternyata para pelaku pemilu 2014 yang lalu tidak berhenti berulah. Kali ini adalah adanya kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar calon legeslatif dalam pemilu dengan cara untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri walaupun merugikan orang lain (Nepotisme). Pelanggaran ini dilakukan cukup merata, sebab para calon legeslatif berpendapat bahwa proses pengumpulan suara harus dilakukan dengan cara yang tidak sewajarnya.

Bentuk pelanggaran di atas sangat dibenarkan adanya, karena banyaknya bukti yang di peroleh oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli pada tanggal 03 Desember 2015 yaitu :

“Memang benar adanya pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan umum calon legislatif 2014 di Kabupaten Gowa, dengan beberapa temuan yakni, pada saat pemungutan suara, dan perhitungan suara. Belum lagi adanya berbagai laporan yang di lakukan oleh beberapa warga. Akan tetapi proses penyelidikannya belum di lakukan karena mengingat pemilu baru saja di laksanakan pada hari itu, namun ke depannya akan di umumkan karena di Tahun 2015 ini sudah di lakukan penyelidikan dan ternyata memang benar ada yang sudah menjadi tersangka dengan tuduhan bermacam-macam termasuk ketiga pelanggaran di atas”.¹

Selain dari pernyataan di atas, laporan beberapa warga menyangkut adanya kegiatan yang di lakukan oleh calon legeslatif terhadap penyalagunaan yang menguntungkan diri sendiri. Proses ini sangat berlangsung lama karena kegiatan tersebut di lakukan sebelum pemilihan di laksanakan atau ketika para calon melakukan kegiatan sosialisasi sampai pada proses kampanye.

Tidak terkecuali pelanggaran yang dilakukan di bidang ekonomi, akan tetapi calon legeslatif yang ikut dalam proses pemilihan legeslatif pada pemilu 2014 yang lalu banyak melakukan pelanggaran di hukum. Padahal jika melihat latar belakang masing-masing calon legeslatif, banyak di antara calon legeslatif yang sadar mengenai pelaksanaan hukum. Akan tetapi, demi meloloskan diri menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak yang melupakan proses pelaksanaan hukum yang sebenarnya.

¹Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli.,ST. Kepala Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Tanggal 28 Februari 2015 Pukul 10.12 Wita

Di antara banyaknya pelanggaran yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu 2014 yang lalu khususnya di bidang hukum adalah adanya calon yang sampai melakukan perbuatan asusila, penggelapan, pencurian dan bahkan sampai pada keterlibatan dalam dunia masyarakat. Maksudnya adalah terlibatnya masyarakat dalam pandangan perbedaan hak antara masyarakat yang lain dengan masyarakat yang notabenenya sangat mendukung calon legislatifnya atau kerabat bahkan sanak keluarganya.

Bentuk pelanggaran ini sangat mengubah wajah hubungan dalam masyarakat yang sebelumnya sangat menjaga toleransi antar sesama namun setelah pemilihan berubah menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Keadaan ini memaksa calon legislatif menjadi alasan utama penyebab perselisihan karena setiap calon hanya mengedepankan kemenangan dari pada menjaga dan menjalankan hukum yang sebenarnya. Seperti pengakuan salah seorang warga yang mengatakan bahwa :

“Pada Pemilu 2014 kemarin, banyak masyarakat hanya memilih karena pilihan mereka merupakan keluarga terdekatnya. Selain dari itu, banyak pula masyarakat yang melakukan proses penjelekan suara diwilayah Dapil calonnya. Di samping hal tersebut, sikap mereka terkait perilaku seorang pemilih yang menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu karena calon

pemimpin/parpol/tim sukses tersebut memang pilihan nuraninya adalah perbuatan yang baik atau biasa saja”²

Pelanggaran ini sangat menjadikan masyarakat sebagai alat dalam merusak citra calon legeslatif yang lain, sehingga banyak calon yang mengeluh tentang tindakan yang dilakukan oleh para tim sukses bahkan pada kerabat keluarganya. Proses pemilihan legislatif pada pemilu 2014 dapat dikatakan bahwa pemilu yang demokratis di Kabupaten Gowa tercederai bukan karena pelaksanaannya akan tetapi tercederai karena calon legeslatif yang ikut dalam pertarungan pemilu itu sendiri.

Tidak berhenti hanya pada bidang ekonomi dan hukum saja, akan tetapi di bidang politik itu sendiri berbagai pelanggaran dilakukan oleh para calon legeslatif di pemilu 2014 yang lalu. Pelanggaran ini memang menuai banyak pertanyaan kenapa bisa dilakukan padahal ada pengawas bahkan ada tim peninjau di setiap TPS. Tentu hal tersebut bukan menjadikan alasan bahwa setiap calon legeslatif dan para tim sukses berhenti karena adanya pasal-pasal dan ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang pelaksanaan kegiatan pemilu.

Untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legeslatif khususnya di bidang politik, maka dilakukan peninjauan terhadap beberapa wilayah yang di yakini sangat rawan untuk melakukan praktek kegiatan yang bisa meloloskan para calon legeslatif di pemilu 2014. Terbukti untuk daerah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di dapatkan bahwa pelanggaran kali ini

²Hasil Wawancara Nurani pada Tanggal 04 April 2015 di Wilayah Manggarupi Kabupaten Gowa pukul 11.22 Wita

sangat beresiko. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legeslatif adalah potensi Money Politik secara rata di setiap wilayah pemilihan.

Money politik (politik uang) adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Jelas pelanggaran ini sangat memberikan dampak yang negatif bagi pelaksanaan pemilu yang secara demokrasi dan damai tanpa tipuan semata. Namun di pemilu 2014 kemarin pelaksanaannya berbalik menjadi 90⁰ kecurangan sangat dominan untuk dilaksanakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu adalah hal yang tidak baik karena sama halnya dengan menyogok masyarakat untuk memilihnya. Hal inilah yang berlaku di masyarakat luas, saya tambahkan lagi pak bahwa penyebaran uang di setiap masyarakat sangat besar karena biasa ada yang dapat sampai 2 ratus ribu rupiah. Na kalau begini terus bagaimana dengan orang yang tidak punya uang pasti tidak lolos padahal cara kerja mereka lebih baik dibanding

*dengan yang menyogok. Pokoknya pelanggaran dalam pemilihan calon dewan kali ini sangat parah”.*³

Dengan adanya berbaagai permasalahan di atas, dapat di jelaskan bahwa pemilu 2014 benar mempunyai pelanggaran. Sehingga untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut tentu pengawas pemilu harus berhati-hati dalam melaksanakan pemeriksaan yang diyakini memiliki pelanggaran pemilu. Karena penyebab dari pelanggaran ini adanya dorongan tersendiri dari person yang melakukan tindak kecurangan. Salah satu faktor yang di utamakan oleh para calon legeslatif untuk melakukan pelanggaran adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang sangat melampaui batas kewajaran hukum.

Namun tidak hanya hal tersebut, dari sisi hukum yang ditegakkan di Indonesia yaitu baik pelaksanaannya di daerah tingkat satu bahkan sampai di Kabupaten, Kecamatan ataupun setiap Desa dapat di yakini bahwa kurang tegasnya penegakan hukum dalam pengambilan keputusan. Sebab ketika pengambilan keputusan diputuskan maka hanya satu pihak yang menerima dengan lapang dada namun pihak yang lain tidak menerima sama sekali.

Indonesia memang sangat terkenal dengan tidak adanya kepercayaan yang lebih bahkan dari pejabat atau masyarakat sekalipun. Untuk itu, dalam kegiatan yang berhubungan dengan pendanaan kalau mampu dibeli setidaknya mereka menawarnya sehingga di temukan kesepakatan untuk proses jual-beli di laksanakan. Selain hal tersebut, belakangan ini menyebarnya budaya Nepotisme

³Hasil Wawancara dengan Ashadi pada Tanggal 04 april 2015 di Bonto-bontoa Kabupaten Gowa pukul 13.10 Wita

yang tidak mampu di bendung lagi keberadaannya. Apalagi masyarakat dalam hal ini yang memiliki indeks pemikiran yang lebih rendah tentu akan memiliki kesadaran yang relatif masih sangat kurang untuk menjunjung tinggi dan menegakkan hukum yang sebenarnya.

B. Penanganan Panwaslu Dan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 Di Kecamatan Somba Opu Kabupeten Gowa

Proses penanganan terhadap potensi pelanggaran dalam pemilihan legislatif Kabupaten Gowa ditindaklanjuti secara berjenjang dimana temuan Pengawas Pemilu Lapangan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Setelah itu Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan perbaikan dan juga melaporkan kembali ke Panwaslu Kabupaten Gowa. Begitupun dengan Panwaslu Kabupaten Gowa selain melanjutkan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga merekomendasikan hasil temuan tersebut ke KPU Kabupaten Gowa untuk segera melakukan pengecekan dan perbaikan data (Surat rekomendasi terlampir).

Tahapan Indentifikasi Pelanggaran demokrasi Prosedural dalam pemilu Legislatif Kabupaten gowa memiliki bebrapa tahapan yakni:

1. Penyusunan Daftar Pemilih
2. Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD
3. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
4. Pencalonan Anggota DPRD
5. Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD
6. Kampanye

7. Dana Kampanye
8. Pengadaan Dan Distribusi Logistik
9. Pemungutan Dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perolehan Suara
11. Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih
12. Pelantikan

Potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan Pemilu Legislatif Kabupaten Gowa dapat terjadi pada setiap proses yang telah diatur mekanisme pengawasannya dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dari semua tahapan demokrasi Prosedural dalam pemilu Legislatif Kabupaten Gowa mempunyai potensi untuk terjadi pelanggaran akan tetapi tidak semuanya teridentifikasi adanya pelanggaran namun terdapat dua tahapan yang teridentifikasi pelanggaran yakni: Pada saat Kampanye, pemungutan Dan Penghitungan Suara dan Pada saat rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perolehan Suara.

1. Identifikasi Penanganan Pelanggaran Kampanye

Pada masa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat 3 (tiga) dugaan pelanggaran yang muncul berdasarkan temuan dari pengawas pemilu yaitu :

1. Temuan dari Supardi Naja PPL Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat pada Tanggal 15 Februari 2014 dengan Nomor Registrasi 02/TM/PILEG/II/2014 pada tanggal 17 Februari 2014. Temuan tersebut terkait dugaan keterlibatan seorang Kepala Desa atas nama

Sukarni Dg. Siruwa dan seorang Kepala Dusun atas nama Abd. Hamid Dg. Nai dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Caleg DPRD I Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Gowa-Takalar dari Partai Golkar atas nama Rismawati Kadir Nyampa.

2. Temuan dari Rahmatiah, SH. Dan Napisah PPL Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu pada Tanggal 13 Februari 2014 dengan Nomor Registrasi 02/TM/PILEG/II/2014 pada tanggal 18 Februari 2014. Temuan tersebut terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Dr. H. Rahmansyah, M.Si. Caleg DPRD I Dapil Gowa-Takalar dari Partai Golkar dan Hj. Irmawati Haeruddin, SE. Caleg DPRD II Dapil 2 Gowa dari Partai Golkar dengan membagi-bagikan sarung dan stiker dalam acara sosialisasinya.
3. Temuan dari Abd. Malik, S.Ag. Anggota Panwaslu Kecamatan Pattallassang pada Tanggal 18 Februari 2014 dengan Nomor Registrasi 03/TM/PILEG/II/2014 pada tanggal 19 Februari 2014. Temuan tersebut terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Ir. Darmawansyah Muin, M.Si. Caleg DPRD I Dapil Gowa-Takalar dari Partai Gerindra dengan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- sebagai imbalan kuis kepada masyarakat dari acara sosialisasinya.

Ketiga temuan tersebut telah diteruskan dari Pengawas Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. Kemudian dikaji dan dibahas dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa dengan hasil bahwa ketiga

temuan tersebut tidak cukup unsur untuk ditetapkan sebagai pelanggaran pidana pemilu sehingga tidak dapat diteruskan.

2. Identifikasi Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan tahapan yang paling berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum. Pada hari pemungutan suara terdapat berbagai laporan yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang sebagian besar berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum.

Beberapa laporan yang diterima tersebut mempermasalahkan tentang pelayanan Anggota KPPS di TPS terhadap pengguna KTP yang tidak sesuai prosedur, permasalahan pemberian salinan Formulir C1 kepada Saksi Partai Politik, Dugaan pencurian dan penggelembungan suara, keterlibatan Anggota KPPS mengintimidasi pemilih di TPS pada saat pemungutan suara dilaksanakan, dan laporan dugaan melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali. Laporan-laporan tersebut diterima dan dilakukan pengkajian oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa.

Adapun uraian dari Laporan dan Temuan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari Drs. H. Taba Yusarif teregistrasi pada tanggal 9 April 2014 dengan Nomor Laporan 02/LP/PILEG/IV/2014 yang melaporkan

Petugas KPPS TPS 14 Tompobalang Kecamatan Somba Opu. Pelapor melaporkan bahwa Keluarga Pelapor yang terdiri dari 12 orang serumah hanya 1 orang yang diberikan Undangan C6 sementara 11 orang lainnya tidak diberikan. Pada hari pemungutan suara mengaku telah dipersulit oleh Petugas KPPS pada penggunaan KTP bagi yang tidak mendapatkan C6. Pembahasan dalam Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa mengundang Pelapor dengan undangan klarifikasi Nomor 032/L/SG.Panwaslu-GW/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 akan tetapi Pelapor tidak memenuhi undangan sehingga laporan tersebut diputuskan tidak dapat dilanjutkan.

2. Laporan dari Drs. Kamaluddin Ahmad, MM. teregistrasi pada tanggal 12 April 2014 dengan Nomor Laporan 05/LP/PILEG/IV/2014 yang melaporkan Rostini. Pelapor melaporkan bahwa terjadi dugaan pencoblosan lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh Rostini pada TPS yang ada di Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu mengundang Pelapor dan Saksinya dengan undangan klarifikasi Nomor 038/L/SG.Panwaslu-GW/IV/2014 tertanggal 12 April 2014. Hasil pembahasan menyatakan bahwa laporan tentang dugaan pencoblosan lebih dari 1 kali hanya dapat dibuktikan bahwa terlapor memilih pada tempat yang mendaftarnya sebagai pemilih tambahan yang menggunakan KTP/KK, akan tetapi tidak dapat dibuktikan apakah dia menggunakan hak pilihnya pada tempat lain sesuai yang terdaftar namanya dalam DPT.

Pelapor tidak menghadirkan saksi yang mampu menyaksikan langsung
Terlapor menggunakan hak pilihnya pada dua tempat yang berbeda
sehingga laporan tersebut diputuskan tidak dapat dilanjutkan.

3. Identifikasi Pelanggaran dan Penanganan Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perolehan Suara

Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan puncak terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa, ditandai dengan banyaknya laporan baik dari peserta pemilu, masyarakat, maupun pemerhati pemilu. Selama proses rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat PPS, PPK sampai pada tingkat KPU Kabupaten Gowa terdapat berbagai laporan yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang sebagian besar berupa dugaan penggelembungan dan pencurian suara baik oleh caleg dari partai politik yang berbeda maupun caleg dari sesama partai politik. Laporan-laporan tersebut diterima dan dilakukan pengkajian oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa.

Tabel 2. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran

NO	PELAPOR DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NOMOR LAPORAN	TINDAK LANJUT LAPORAN	ALASAN
1	Pelapor : Janawati	Dugaan perampasan C1 Pleno TPS 6 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan	06/LP/ PILEG/IV /2014	Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat	Pelapor menarik laporannya

	<p>Terlapor : Marsuki, HM., SE.</p>	<p>Somba Opu yang dilakukan oleh Marsuki, HM., SE. di Kantor Kelurahan Sungguminasa pada 12 April 2014 dilaporkan oleh Janawati Petugas KPPS TPS 06 Sungguminasa</p>		dilanjutkan	
2	<p>Pelapor : Aslan</p> <p>Terlapor : Petugas PPS Kelurahan Romang Polong</p>	<p>Dugaan pencurian suara yang dilakukan oleh Petugas PPS Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu pada proses rekapitulasi tingkat PPS karena data C1foto copy pada Pelapor diduga telah dimanipulasi yang dilaporkan oleh Aslan saksi PPS Partai Gerindra</p>	<p>07/LP/ PILEG/IV/ 2014</p>	<p>Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan</p>	<p>Data C1 foto copy dari Pelapor tidak bisa dijadikan dasar karena data Pembanding Panwaslu Kabupaten Gowa telah sesuai dengan data PPS dan data yang dituntut oleh Pelapor</p>

3	<p>Pelapor : H. A. Hasanuddin Sila Abe, SH.</p> <p>Tedrlapor : Petugas PPS Sungguminasa dan Pandang-Pandang</p>	<p>Dugaan pencurian suara yang dilakukan oleh Petugas PPS Pandang-Pandang dan Petugas PPS Sungguminasa Kecamatan Somba Opu serta dugaan adanya Pemetaan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa secara terstruktur dan massif yang dilaporkan oleh H. Andi Hasanuddin Sila Abe, SH.</p>	<p>08/LP/ PILEG/IV/ 2014</p>	<p>Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan</p>	<p>Pelapor tidak mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan untuk mengubah perolehan suara dan juga tidak terdapat bukti yang kuat menunjukkan kesengajaan tersebut</p>
4	<p>Pelapor : H. Hamli Halim, SE., MM.</p> <p>Terlapor : Petugas KPPS TPS 16 dan PPS Pacci'nongang</p>	<p>Dugaan terjadinya penggelembungan suara di TPS 16 Kelurahan Pacci'nongang Kecamatan Somba Opu dengan terjadinya perbedaan antara C1 Palano dengan C1 kecil. Pada C1 Plano</p>	<p>11/LP/ PILEG/IV/ 2014</p>	<p>Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan</p>	<p>Tidak cukup saksi dan bukti yang menjelaskan adanya kesengajaan Terlapor.</p>

		untuk suara DPRD II Partai Gerindra Caleg Nomor urut 5 atas nama H. Faisal Achmad tertulis 3 suara sementara pada C1 kecil tertulis 13 suara.			
5	<p>Pelapor : H.A. Hasanuddin Sila Abe, SH.</p> <p>Terlapor : Petugas KPPS</p>	<p>Dugaan tidak diberikannya salinan C1 kepada saksi Partai Demokrat dan sebagian yang lainnya diberikan dalam bentuk foto copy pada hamper seluruh wilayah Kecamatan Somba Opu.</p>	12/LP/ PILEG/IV/ 2014	Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan	<p>Tidak diberikannya salinan C1 pada sebagian besar saksi parpol Demokrat karena ketidakmampuan saksi menunggu sampai proses penghitungan suara di TPS selesai</p>
6	Pelapor : H. A.	Tidak adanya penyerahan	18/LP/	Dibahas Tim Sentra	Pelapor tidak

	Hasanuddin Sila Abe, SH. Terlapor : Petugas KPPS dan PPS	model C dan Model D pada saksi parpol di hampir seluruh wilayah Kecamatan Somba Opu sehingga tidak ada acuan pada saat rekapitulasi selanjutnya.	PILEG/IV/ 2014	Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan	menyertakan bukti dan saksi yang mendukung laporannya. Adanya saksi yang tidak memperoleh lampiran C1 dan D1 dikarenakan tidak bias menunggu sampai proses Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara selesai.
7	Pelapor : Amuruddin, SH. Terlapor :	KPU Kabupaten Gowa diduga melanggar PKPU bahwa 3 (tiga) jam setelah penghitungan suara di	20/LP/ PILEG/IV/ 2014	Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran

	Komisioner KPU Gowa	KPPS, KPU harus mempublikasikan hasil rekap di KPPS se-Kabupaten Gowa melalui data online di website KPU akan tetapi itu tidak dilaksanakan.			pidana karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Gowa yang sebagian besarnya dataran tinggi yang memungkinkan an petugas KPPS tidak langsung menyeter salinan C1 kepada KPU pada hari itu juga.
8	Pelapor : Arifuddin Lewa Terlapor : Ketua	Adanya salinan C1 dari TPS 06 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu yang diberikan kepada	24/LP/ PILEG/IV/ 2014		Barang bukti yang dibawa oleh Pelapor tidak bisa

	KPPS TPS 06 Sungguminasa	beberapa saksi Partai Politik dengan hasil perolehan suara yang berbeda.			dijadikan sebagai alat bukti karena hasil foto copy sementara data pembanding Panwaslu sama dengan data yang dipakai pada proses rekapitulasi yang berlangsung di PPS dan PPK.
9	Pelapor : H. Hamli Halim, SE., MM. Terlapor :	Proses Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Somba Opu dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Gowa. Pada saat	29/LP/ PILEG/IV/ 2014	Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dengan Berita Pembahasan Nomor 114/L/SG.Panwaslu	Memenuhi U nsur Pelanggaran Pidana Pemilu

	Alimuddin Dg. Nyongri (Anggota PPK Kecamatan Somba Opu)	penghitungan yang dilakukan oleh terlapor diduga dengan sengaja melakukan pencurian suara dengan mengurangi perolehan suara salah satu caleg untuk memindahkannya ke caleg lain. Proses tersebut berlangsung ricuh akibat protes yang diajukan oleh Caleg yang merasa dirugikan hingga akhirnya KPU Kabupaten Gowa memerintahkan untuk dilakukan penghitungan kembali.		-GW/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 dan dilanjutkan ke tingkat Penyidikan dengan Surat Penerusan Nomor 120/L/SG.Panwaslu -GW/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 serta sudah putusan pengadilan dengan kurungan penjara 3 bulan dan denda 2 juta rupiah	
10	Pelapor : Kemal Dg. Serang Terlapor : Petugas KPPS dan PPS	Pada saat penghitungan surat suara ulang Kecamatan Somba Opu di Kantor KPU Kabupaten Gowa tidak ditemukan C1 Plano dalam kotak TPS	30/LP/ PILEG/IV/ 2014	Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan	Pelapor tidak melengkapi bukti pembanding yang diminta Tim Sentra

		17 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu dengan alasan pada saat selesai penghitungan suara di TPS dilupa diambil. Dari hasil penghitungan surat suara ulang terjadi perubahan data dari C1 yang telah dibuat pada Hari Pemungutan Suara.			Gakkumdu
11	<p>Pelapor : Haeruddin Genda</p> <p>Terlapor : Petugas KPPS</p>	<p>Selesai Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Somba Opu di Kantor KPU Kabupaten Gowa terdapat perbedaan data perolehan suara yang sangat signifikan di TPS 12 Batangkaluku Kecamatan Somba Opu antara C1 Plano hasil isian di TPS dengan C1 hasil isian Penghitungan</p>	32/LP/ PILEG/V/ 2014	Dibahas Tim Sentra Gakkumdu dan tidak dapat dilanjutkan	Pelapor tidak melengkapi bukti yang diminta Tim Sentra Gakkumdu

		Suara Ulang Kecamatan Somba Opu.			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, 2015

Berdasarkan rekapitulasi laporan pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara tersebut, hasil pembahasan dan kajian Tim Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menetapkan 10 laporan yang tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, sedangkan 1 laporan diputuskan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan serta telah ada vonis Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap Pelaku. Kedua laporan tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. H. Hamli Halim, SE., MM. teregistrasi pada tanggal 26 April 2014 dengan Nomor 29/LP/PILEG/IV/2014 yang melaporkan Alimuddin Dg. Nyonri Anggota PPK Kecamatan Somba Opu atas dugaan melakukan pengurangan suara pada Caleg DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Gerindra atas nama H. Hamli Halim, SE., MM. dan menambahkannya kepada Caleg lain sesama partai dengan tujuan untuk memenangkan

caleg tersebut pada saat proses penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Somba Opu di Kantor KPU Kabupaten Gowa. Hasil pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa Nomor 114/L/SG.Panwaslu-GW/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 memutuskan bahwa Terlapor terbukti melanggar pasal yang disangkakan yaitu Pasal 309 Subs Pasal 312 UU Nomor 8 Tahun 2012 karena pemeriksaan terhadap saksi dan bukti yang ada telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Sehingga dilanjutkan ke tingkat penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan dengan Surat Penerusan 120/L/SG.Panwaslu-GW/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 dan telah melewati proses pengadilan dengan vonis kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebanyak 2 juta rupiah.

Dengan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon legeslatif pada pemilu 2014 yang lalu, kebenaran akan hal tersebut tidak di ragukan lagi. Hal ini dibenarkan oleh pihak bawaslu, Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan yang menyatakan pada saat melakukan wawancara pada tanggal 03 Desember 2015 bahwa :

“Memang benar adanya pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan umumnya yaitu para calon legislatif 2014 di Kabupaten Gowa, dengan beberapa temuan yakni, pada saat pemungutan suara, dan perhitungan suara. Temuan-temuan tersebut di yakini sebagai pelanggaran politik yang dilakukan oleh para calon legeslatif di mana tujuannya adalah hanya untuk meloloskan diri sendiri tanpa adanya fikiran bahwa yang

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pemilihan umum atau Pemilu”,⁴

Pemilu Legislatif 2014 telah berlalu. Jika melihat dan diingat kembali pada bulan Maret tahun 2014 merupakan masa kampanye partai politik dan kandidat (calon anggota legislatif) untuk menarik simpati pemilih. Berbagai atribut kampanye, mulai dari spanduk, baliho, hingga stiker memenuhi fasilitas-fasilitas publik. Tidak hanya itu, masyarakat di suguhi panggung-panggung hiburan yang tidak sedikit melibatkan artis sebagai penarik dukungan. Bahkan di layar kaca, partai politik saling mencitrakan diri sebagai malaikat pemberi jawaban atas derita masyarakat. Pada momen kampanye tersebut marak terjadi politik uang antara pemilih dengan kandidat.

Pelanggaran pemilu marak terjadi saat digelarnya pemilu. Di lokasi penelitian pun banyak ditemukan pelanggaran, bahkan beberapa lapisan masyarakat yang mengetahui bahwa terjadi pelanggaran hanya diam saja dan yang lebih berperan adalah para tim sukses dari para kandidat. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Ketika ditanya mengenai apa yang anda ketahui tentang pelanggaran pemilu dan berikan contoh mengenai pelanggaran pemilu yang anda ketahui?. Salah satunya adalah Ibu Aslinda berpendapat dan menyatakan dalam sesi wawancara bahwa :

“Hal yang paling saya perhatikan dalam proses pemilu kemarin adalah adanya keinginan dan kemauan para calon legeslatif untuk

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli.,ST. Kepala Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Tanggal 28 Februari 2015 Pukul 10.12 Wita

*melakukan pengelembungan suara dan pemberian uang yang merupakan politik uang yang dilakukan oleh para kandidat, parpol, dan tim suksesnya. Hal seperti ini memang bukanlah sesuatu yang sangat baru bagi masyarakat akan tetapi kegiatan ini seharusnya jangan dilakukan di hadapan masyarakat apalagi untuk memberikan imbalan atau suatu jaminan. Sebab perlu diketahui bahwa kegiatan seperti ini sangat bertentangan dengan pilihan hati masyarakat itu sendiri”.*⁵

Artinya secara keseluruhan masyarakat pemilih memahami bahwa pemberian uang merupakan tindakan politik uang dan pengelembungan suara adalah kecurangan dalam pemilu. Beberapa kategori lain yang juga dikenali pemilih sebagai politik uang berturut-turut adalah Pemberian paket sembako, Pemberian barang elektronik, Pemberian modal kerja usaha, *Door prize*/hadiah undian dan Pemberian kaos. Begitupula hal yang dikemukakan oleh masyarakat lain yang di wawancarai mengenai pengetahuan mereka mengenai pelanggaran pemilu.

Pemahaman yang baik dari pemilih tersebut cukup menggembirakan, meskipun demikian perlu menjadi perhatian bahwa cukup banyak responden yang menganggap hal-hal berikut bukanlah politik uang, yaitu Perbaikan rumah warga, dan bazar murah yang dilaksanakan oleh kandidat/parpol menjelang/saat pemilu.

⁵ Wawancara dengan Aslinda pada tanggal 04 April 2015 bertempat di Dusun Bontokamase Kabupaten Gowa pada Pukul 14.25 Wita

Ketika ditanya mengenai pemberian barang/jasa bahkan uang dari kandidat/parpol menjelang / saat pemilu termasuk hal yang tidak baik, 3 dari 4 masyarakat menyatakan pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu termasuk hal yang baik dan lumrah untuk masyarakat yang kurang mampu. Beberapa alasan yang banyak diungkapkan antara lain membantu masyarakat, karena kebutuhan, karena rezeki, dan bahkan ada masyarakat yang secara terang mengatakan karena kegiatan seperti ini memang harus dilaksanakan oleh calon legeslatif. Kemudian masyarakat pun berpendapat bahwa calon legeslatif yang suka membantu yang wajar mewakili mereka bukan calon yang terbatas kemampuannya.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang memberikan pendapat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa calon legeslatif pada Pemilu 2014 kemarin. Kali ini bernama Ochien Marhaban Rani yang mengatakan dengan tegas dalam kesempatan wawancara bahwa :

“Pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu adalah hal yang tidak baik karena sama halnya dengan menyogok masyarakat untuk memilihnya. Pernyataan ini sangat di benarkan karena saya sendiri yang melihat, dan perlu diketahui bahwa jalannya salah otomatis hasilnya nanti juga tidak terlalu menggembirakan untuk bekerja mewakili rakyat di Pemerintahan”⁶.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ochien Mrhaban Rani pada Tanggal 04 April 2015 di Bontobontoa Kabupaten Gowa pukul 13.10 Wita

Bila ditelusuri lebih jauh, informan yang menyatakan pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu termasuk hal yang baik, terdapat fenomena yang cukup menarik. Secara keseluruhan bila dilihat dari tingkat usia, ternyata semakin bertambah usia, cenderung semakin mentolerir adanya pemberian barang/jasa/uang menjelang/saat pemilu. Hal yang cukup mengejutkan adalah informan yang menyandang gelar sarjana menyatakan bahwa pemberian barang/jasa/uang menjelang/saat pemilu adalah baik.

Dari pemaparan para informan tersebut, dapat disimpulkan alasan responden yang menyatakan pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu termasuk hal yang perlu dilakukan karena beberapa alasan yang banyak diungkapkan antara lain membantu masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, bahkan ada calon yang secara terang-terangan membantu masyarakat karena memang tujuannya hanya untuk mendapatkan tambahan suara untuk meloloskan dirinya. Akan tetapi hal ini dibenarkan adanya karena pihak pengawas pemilu di Kecamatan yang mengatakan ketika dilakukan wawancara adalah :

“Memang benar adanya pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan umumnya yaitu para calon legislatif 2014 di Kabupaten Gowa, dengan beberapa temuan yakni, pada saat pemungutan suara, dan perhitungan suara. Temuan-temuan tersebut di yakini sebagai pelanggaran politik yang dilakukan oleh para calon legeslatif di mana tujuannya adalah hanya untuk meloloskan diri sendiri tanpa adanya fikiran bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam

*pemilihan umum atau Pemilu. Akan tetapi, pihak panwas kecamatan menjelaskan kembali bahwa pelanggaran tersebut sudah ditangani pihak panwas Provinsi dengan bantuan dari kepolisian ”.*⁷

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan kepada masyarakat yang menjadi informan mengenai seorang pemilih yang menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu dengan alasan masyarakat bisa mendapatkan sesuatu secara langsung dari calon pemimpin/pemimpin hanya saat pemilu? Informan yang bernama Ashadi menyatakan bahwa :

*“Sikap mereka terkait perilaku seorang pemilih yang menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu karena calon pemimpin/parpol/tim sukses tersebut memang pilihan nuraninya adalah perbuatan yang baik atau biasa saja. Namun tentu hal tersebut sangat tidak masuk akal, karena tidak mungkin seorang calon legeslatif berkorban tanpa mengharapkan imbalan. Apalagi hal ini menyangkut dengan masalah kebutuhan atau garis besarnya menyangkut masalah Uang.”*⁸.

Jawaban dari saudara Ashadi telah mewakili pernyataan dari informan yang lain yang berpendapat bahwa kapan lagi masyarakat mendapatkan pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses karena apabila telah selesai masa pemilihan sudah tidak ada lagi yang mereka bisa dapatkan.

⁷Hasil Wawancara dengan Alfian Ali Nompo, S.Pd. ketua PANWASCAM di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada Tanggal 28 Februari 2015 Pukul 14.25 Wita

⁸ Hasil Wawancara dengan Sri Ramayanti pada Tanggal 05 April 2015 di Wilayah Manggarupi Kabupaten Gowa pukul 11.22 Wita

Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan aturan pemilu dan kampanye sehingga masyarakat agar mereka lebih faham mana yang benar dan yang salah dari apa yang dilakukan oleh calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu sehingga mereka mengetahui hal-hal apa saja yang merupakan pelanggaran pemilu dan kampanye sehingga masyarakat juga dapat turun tangan mengawasi proses pemilu agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.

Selanjutnya, hal yang urgen dan vital dalam upaya penguatan demokrasi dalam pemilu di Indonesia dapat dilakukan dalam rana penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Rana tersebut merupakan rana yang tepat dan bersifat kongkret dalam memberikan nilai-nilai demokrasi substantif yang sesuai dengan hakikatnya.

Dalam menyelenggarakan upaya penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi substantif. Dikarenakan rana tersebut merupakan bagian yang bersifat satu kesatuan dari adanya demokrasi prosedural yaitu pelaksanaan pemilu di Indonesia sebenarnya memiliki tata cara yang baik. Namun dewasa ini terjadi hal menarik yang berkaitan dengan penguatan demokrasi substantif dalam penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu di Indonesia. Hal ini perlu di perbincangkan untuk di temukan jalan keluarnya. Sebagaimana pada wawancara dengan Bapak Mukhtie Fadjar yang mengatakan bahwa :

Terdapat tiga kriteria pelanggaran Pemilu yang serius yang mengancam asas Luber dan Jurdil ialah; yang pertama adanya

pelanggaran tersebut bersifat sistematis (direncanakan, bukan insidental) baik bagi personal calon legeslatif itu sendiri ataupun melalui tim suksesnya, yang kedua adalah adanya timpang tindih antara yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu (bukan bersifat individual). Hal ini tentu mengarah pada pelaksana bahkan pemimpin sekaligus. Dan yang terakhir adalah adanya pelanggaran tersebut sangat meluas (masif, bukan sporadis).⁹

Ditinjau dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 C ayat (1) ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yang dimaksud perselisihan hasil pemilu ialah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta (Pasal 158 UU Pemilu). Jadi, MK hanya sekedar berkewenangan dalam perselisihan hasil dari pemilu saja. Akan tetapi jika hanya seperti itu maka dikuatirkan tidak tercapainya keadilan substantif. Dikarenakan dalam memutus hasil pemilu harus memperhatikan proses dan bukan sekedar berindikator pada perhitungan hasil semata.

Sama halnya dengan penyelesaian pelanggaran pemilu juga harus didasari oleh demokrasi substantif. Pelanggaran pemilu dibagi menjadi dua macam yaitu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Untuk pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Pasal 148 s.d 251 UU No.10 tahun

⁹ Kutipan pernyataan oleh Bapak Prof. A. Mukthie Fadjar.,SH.,MH dengan Tema *Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press : Jatim, Hlm 118. 2013

2008 dan diselesaikan oleh KPU berdasarkan laporan Banwaslu. Sedangkan pelanggaran pidana pemilu diatur dalam Pasal 252 s.d 259 UU No.10 Tahun 2008 dan lembaga yang menyelesaikan ialah Pengadilan Negeri dan dapat banding ke Pengadilan Tinggi. Kasus pelanggaran pemilu harus diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu.

Lebih spesifik lagi mengenai jenis pelanggaran pemilu, dari fakta yang didapatkan di lokasi penelitian, masyarakat masih belum mengetahui jenis dari pelanggaran pemilu. Masyarakat hanya mengenahui sebatas bagaimana pelanggaran pemilu tersebut. Dari pernyataan informan yang bernama Nunu Harun yang menyatakan bahwa

“Pelanggaran yang terjadi dalam pemilu yaitu penggelembungan suara, ada pula pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan penghilangan kotak suara dimana hal ini dapat terjadi apabila dalam satu wilayah sangat ketat persaingannya. Pelanggaran yang lain adalah keterangan beberapa saksi dari tim-tim yang di tunjuk untuk melakukan rekapitulasi suara.”¹⁰

Namun ketika diminta menjelaskan mengenai jenis pelanggaran tersebut semua informan tidak ada yang dapat menjelaskan. Mungkin saja para informan merasa ketakutan atau tidak memiliki pengetahuan selain apa yang di lihat serta sesuai dengan kejadian di lapangan.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Suriyani pada Tanggal 05 April 2015 di Jl.Dr.Wahidin Sudiro Husodo pada Pukul 15.00 Wita

Dari fakta yang di dapatkan di lokasi penelitian, masyarakat hanya mengetahui pelanggaran pemilu secara umum sehingga masyarakat tidak begitu faham untuk memetakan termasuk jenis pelanggaran apa yang terjadi di daerah mereka. Menyikapi hal tersebut, maka Bapak Bripka Muhammad Akbar SH, menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legeslatif di Pemilu 2014 yang lalu. Penjelasan tersebut di peroleh pada saat melakukan wawancara pada tanggal 03 Desember 2015 yang lalu, bahwa :

“Proses pelanggaran pemilu itu beda dengan proses hukum pidana umum. Dalam poros pelanggaran pemilu ada namanya tim yang dibuat yaitu GAKAUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu”¹¹.

Lembaga pertama yang menerima laporan jika terdapat kecurangan ialah pihak dari PANWASLU (Pengawas Pemilu), setelah ada laporan baik dari tim sukses, dari caleg ataupun dari masyarakat tentang adanya pelanggaran pemilu, kemudian Panwaslu mempelajari laporan itu. Setelah dilakukan analisa dan ternyata benar terjadi pelanggaran, laporan tersebut akan segera ditindak lanjuti oleh tim GAKKUMDU (*Penegakan Hukum Terpadu*) yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan, kemudian dilakukan gelar perkara. Setelah disepakati bahwa perkara ini dapat disidangkan harus melalui beberapa proses, diantaranya dari

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bripka Muhammad Akbar., SH pada Tanggal 8 April 2015 di Polres Gowa tepat pada Pukul 15.23 Wita.

Panwaslu ke Polisi, kemudian Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemanggilan terhadap terlapor atau tersangka, itupun digelar juga.

Selanjutnya, di Kepolisian digelar lagi untuk meningkatkan status seseorang menjadi tersangka digelar kembali perkara itu, setelah ada keputusan atas kelengkapan berkas, barulah pihak Kepolisian mengirim berkas tersebut ke Kepolisian. Jika pihak Kejaksaan sudah menyatakan perkara tersebut P21 (perkara dinyatakan lengkap) kemudian pihak Kepolisian mengirim barang bukti ke Kejaksaan.

Berkas yang telah di kirim dan di nyatakan P21 (lengkap) pihak Kepolisian mengirim barang bukti (yang disebut dengan Tahap 2) dimana Tahap 2 ini adalah pengiriman tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. Setelah tahap ke dua maka Kepolisian dinyatakan telah selesai dalam penyidikan. Giliran pihak Kejaksaan yang mengirim berkas tersebut ke pengadilan untuk selanjutnya disidangkan. masalah tindak pidana pelanggaran pemilu biasanya hanya diberi hukuman yang ringan, ada yang hanya tiga bulan, sembilan bulan, bahkan satu tahun. Oleh karena itu tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, dan perkara dilanjutkan sambil menunggu proses persidangan. Pemanggilan terhadap tersangka dilakukan ketika akan digelar persidangan. Hal yang perlu diketahui bahwa tindak pidana pemilu tidak seperti dengan tindak pidana umum lainnya. Tindak pidana pemilu memiliki batas-batas waktu yang ditentukan, sedangkan tindak pidana umum tidak memiliki batas waktu kecuali kadaluarsa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian diatas, ditemukan bahwa terdapat beberapa praktek pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legeslatif Pemilu 2014 khususnya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi sehingga memunculkan adanya kegiatan pelanggaran dalam Pemilu 2014 yang lalu adalah karena banyak diantara para calon memiliki keterkaitan kekerabatan yang dalam antara para calon dengan pemegang kekuasaan di Pemerintahan sehingga penyalagunaan kekuasaan sangat gampang dilakukan. Selain dari itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga untuk hal-hal sangat urgen pun disepelekan begitu saja. Di tambah lagi masyarakat yang terlalu gampang di pengaruhi dengan berbagai iming-iming dan imbalan dari para calon sehingga kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai demokratisasi sangat kecil bahkan di tiadakan begitu saja.
2. Dari hasil penelitian tersebut maka identifikasi pelanggaran pemilu calon legislatif di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, telah ditemukan sebanyak 11 pelanggaran, namun penulis memfokuskan terhadap pelanggaran penggelembungan suara yang ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian hingga ke pengadilan dan tata cara penyelesaian pelanggaran

pemilu yaitu penyelesaian atau penanganan pelanggaran pemilu legislatif di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Panwaslu akan meneruskannya ke instansi terkait. Untuk pelanggaran pidana akan selanjutnya akan di teruskan oleh pihak Kerpolisian. Setelah pihak Kerpolisian sudah mengantongi berkas yang sudah dinyatakan sudah P21 (lengkap) pihak Kerpolisian mengirim barang bukti (yang disebut dengan Tahap 2) dimana Tahap 2 ini adalah pengiriman tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. Setelah tahap ke dua maka Kerpolisian dinyatakan telah selesai dalam penyidikan. Giliran pihak Kejaksaan yang mengirim berkas tersebut ke pengadilan untuk selanjutnya disidangkan.

B. Saran

1. Diperlukan adanya metode baru yang dilakukan untuk mendapatkan pemilu berkualitas karena pada kenyataannya masih terdapat banyak masalah pelanggaran pemilu yang terjadi disetiap daerah pemilihan. Selain itu, sosialisasi dari semua unsur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpolitik secara sehat perlu dilaksanakan sehingga semua dapat menyadari bahwa konstitusinya terhadap bangsa dan negara melalui demokrasi sangat dibutuhkan.
2. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencedari proses dan hasil pemilu.
3. Perlu dikembangkannya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi yaitu melakukan penyempurnaan

terhadap aturan yang telah ada, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrument-instrumen complain atas terjadinya pelanggaran pemilu yang lengkap dan lebih penting lagi bahwa aturan yang ditetapkan tersebut dijalankan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrain, *Kehidupan Politik dan Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana 1992
- Alfitri, Rogaiyah. *Jurnal PPKN dan Hukum*. Palembang 2009
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Dayasari, Sriwulan. *Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006*. Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Politik dan Pemerintahan 2010.
- Deliar, Noer. *Gerakan Moderen Islam 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1995
- Fadjar, Mukhtie. *Pemilu dan Demokrasi*, Jatim: Setara Press, 2013
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar HTN Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1998
- Musawir, *Pelanggaran Pemilu Pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2008* Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Politik dan Pemerintahan 2009
- Nugroho, Rian. *Public policy* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2012
- Penjelasan umum atas Undang-undang Pemilu dan Partai Politik 2008, Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Riyanto, Achmad. *Konsep demokrasi di Indonesia Dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar* Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum 2010
- Maciver, M Robert, *The Web Of Government Newyork: The Macmillians Company : 1961*, Dalam muslim mufti, Bandung: Pustaka 2012

Huberman, dan miles. *Analisa data kualitatif* UI Press : Jakarta 1992

Saputri, Sherly. *Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011

Sekar, Paramita. *Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Araska Publisher 2014

Sugiono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2006)

Surbakti, Ramlan Dkk *Penanganan Pelanggaran Pemilu* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2011

Ubaidillah A. Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani* Jakarta : IAIN Press 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Sumber online : <http://Gowakab.co.id>

<http://beritadibumi.blogspot.com/2012/09/pelanggaran-pelanggaran-dalam-berbagai.html>

Nama : Ika Asminasari Situju

Tanggal Wawancara : 03 Desember 2015

No		Lembar Pertanyaan dan Jawaban oleh Responden
1.	Pertanyaan	Bagaimana cara masyarakat memilih calon legeslatif, apakah faktor keluarga dijadikan alasan untuk meloloskan diri atau bagaimana? Dan apakah ini menjadi salah satu faktor pelanggaran yang dilakukan oleh calon legeslatif untuk Kecamatan Sombaopu
	Jawaban Responden	<i>Pada Pemilu 2014 kemarin, banyak masyarakat hanya memilih karena pilihan mereka merupakan keluarga terdekatnya. Selain dari itu, banyak pula masyarakat yang melakukan proses penjelekan suara diwilayah Dapil calonnya. Di samping hal tersebut, sikap mereka terkait perilaku seorang pemilih yang menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu karena calon pemimpin/parpol/tim sukses tersebut memang pilihan nuraninya adalah perbuatan yang baik atau biasa saja</i>
2.	Pertanyaan	Jenis pelanggaran yang bagaimana saja yang dilakukan oleh para calon legeslatif di pemilihan 2014 kemarin?
	Jawaban Responden	<i>Pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu adalah hal yang tidak baik karena sama halnya dengan menyogok masyarakat untuk memilihnya. Hal inilah yang berlaku di masyarakat luas, saya tambahkan lagi pak bahwa penyebaran uang disetiap masyarakat sangat besar karena biasa ada yang dapat sampai 2 ratus ribu rupiah. Na kalau begini terus bagaimana dengan orang yang tidak punya uang pastimi tidak lolos padahal cara kerja mereka lebih baik dibanding dengan yang menyogok. Pokoknya pelanggaran dalam pemilihan calon dewan kali ini sangat parah</i>

3.	Pertanyaan	Hal yang sama seperti pertanyaan No.1, ditanyakan pula kepada Kepala bagian Sub pengawasan pemilu yaitu kepada Bapak Zulkifli
	Jawaban Responden	<i>Memang benar adanya pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan umumnya yaitu para calon legislatif 2014 di Kabupaten Gowa, dengan beberapa temuan yakni, pada saat pemungutan suara, dan perhitungan suara. Temuan-temuan tersebut di yakini sebagai pelanggaran politik yang dilakukan oleh para calon legeslatif di mana tujuannya adalah hanya untuk meloloskan diri sendiri tanpa adanya fikiran bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pemilihan umum atau Pemilu</i>
4.	Pertanyaan	Menurut Bapak apa-apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh calon?
	Jawaban Responden	<i>Hal yang paling saya perhatikan dalam proses pemilu kemarin adalah adanya keinginan dan kemauan para calon legeslatif untuk melakukan pengelembungan suara dan pemberian uang yang merupakan politik uang yang dilakukan oleh para kandidat, parpol, dan tim suksesnya. Hal seperti ini memang bukanlah sesuatu yang sangat baru bagi masyarakat akan tetapi kegiatan ini seharusnya jangan dilakukan di hadapan masyarakat apalagi untuk memberikan imbalan atau suatu jaminan. Sebab perlu diketahui bahwa kegiatan seperti ini sangat bertentangan dengan pilihan hati masyarakat itu sendiri</i>
5.	Pertanyaan	Menurut bapak, bagaimana pendapat anda mengenai pelanggaran pemilu di tahun 2014 yang lalu?
	Jawaban Responden	<i>pemberian barang/jasa/uang dari kandidat/parpol menjelang/saat pemilu adalah hal yang tidak baik karena sama halnya dengan menyogok masyarakat untuk</i>

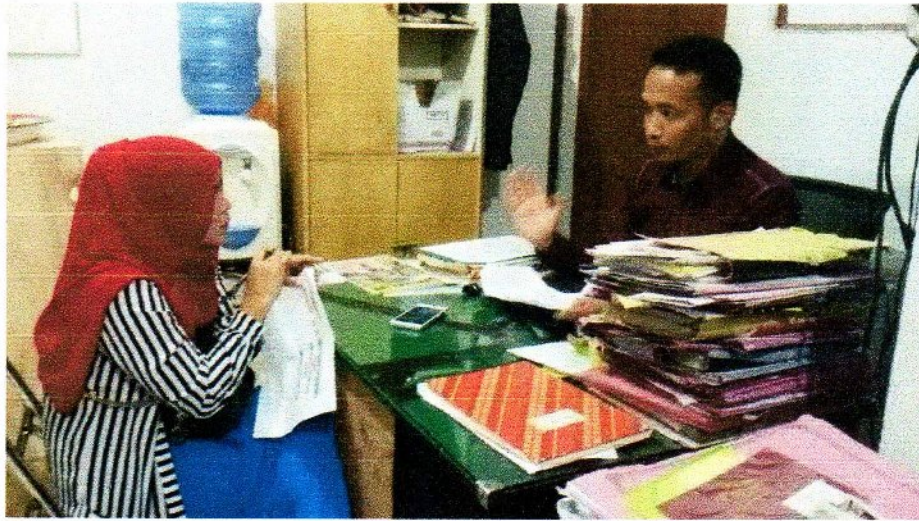
		<i>tersebut sangat meluas (masif, bukan sporadis)</i>
8.	Pertanyaan	Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legeslatif?
	Jawaban Enumerator	<i>Pelanggaran yang terjadi dalam pemilu yaitu penggelembungan suara, ada pula pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan penghilangan kotak suara dimana hal ini dapat terjadi apabila dalam satu wilayah sangat ketat persaingannya. Pelanggaran yang lain adalah keterangan beberapa saksi dari tim-tim yang di tunjuk untuk melakukan rekapitulasi suara</i>
9.	Pertanyaan E	Bagaimana proses pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legeslatif?
	Jawaban Responden	<i>Proses pelanggaran pemilu itu beda dengan proses hukum pidana umum. Dalam poros pelanggaran pemilu ada namanya tim yang dibuat yaitu GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu</i>

		<i>memilihnya. Pernyataan ini sangat di benarkan karena saya sendiri yang melihat, dan perlu diketahui bahwa jalannya salah otomatis hasilnya nanti juga tidak terlalu menggembirakan untuk bekerja mewakili rakyat di Pemerintahan</i>
6.	Pertanyaan	Bagaimana sikap masyarakat mengenai imbalan yang dijanjikan oleh para calon legeslatif di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa?
	Jawaban Responden	<i>Sikap mereka terkait perilaku seorang pemilih yang menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu karena calon pemimpin/parpol/tim sukses tersebut memang pilihan nuraninya adalah perbuatan yang baik atau biasa saja. Namun tentu hal tersebut sangat tidak masuk akal, karena tidak mungkin seorang calon legeslatif berkorban tanpa mengharapkan imbalan. Apalagi hal ini menyangkut dengan masalah kebutuhan atau garis besarnya menyangkut masalah Uang</i>
7	Pertanyaan	Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang di lakukan oleh para calon legeslatif di Kecamatan Sombaopu di pemilu 2014 yang lalu?
	Jawaban	<i>Terdapat tiga kriteria pelanggaran PemiluKada yang serius yang mengancam asas Luber dan Jurdil ialah; yang pertama adanya pelanggaran tersebut bersifat sistematis (direncanakan, bukan insidental) baik bagi personal calon legeslatif itu sendiri ataupun melalui tim suksesnya, yang kedua adalah adanya timpang tindih antara yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu (bukan bersifat individual). Hal ini tentu mengarah pada pelaksana bahkan pemimpin sekaligus. Dan yang terakhir adalah adanya pelanggaran</i>

RIWAYAT RESPONDEN

1. NamaLengkap : Zulkifli S.T
Tempat/TanggalLahir : Makassar
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
AlamatLengkap : Makassar
2. NamaLengkap : Nurani ima
Tempat/TanggalLahir : Makassar
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Lajang
Pekerjaan : wirausaha
Pendidikan : SMA
AlamatLengkap : sungguminasa
3. NamaLengkap : Aslinda Abdullah
Tempat/TanggalLahir : Makassar, 15 april 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : S1
AlamatLengkap : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo sungguminasa
4. NamaLengkap : Ashadi
Tempat/TanggalLahir : 18 januari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Lajang
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : S1
AlamatLengkap : Jl. Kenanga sungguminasa
5. NamaLengkap : Ochien Marhaban Rani
Tempat/TanggalLahir : Makassar, 6 oktober 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Lajanng
Pekerjaan : Sales Ford
Pendidikan : S1
Alamat Lengkap : bonto-bontoa

LAMPIRAN



Wawancara dengan pihak kepolisian, Bripka Muhammad Andi Akbar., SH mengenai proses penanganan pelanggaran pemilu.





Wawancara dengan ketua PANWASCAM Kec. Somba Opu , bapak Alfian Ali Nampo, S.Pd.



Wawancara dengan pihak BAWASLU Provinsi Sul-Sel , bapak Zulkifli ST.

wawancara dengan warga , ibu Sri ramayanti



Wawancara dengan warga, Nurani imha



Wawancara dengan warga , Suriyani.